

Istana Presiden Terapkan WFH 75 Persen Mulai Pekan Depan

JAKARTA (IM) - Kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus melonjak. Pihak Istana Kepresidenan bakal memberlakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 75 persen mulai pekan depan.

"Iya, disesuaikan dengan kepadatan dan volume pekerjaan, seperti misal hari ini volume pekerjaan berkurang maka 75 persen WFH," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Jumat (18/6).

Heru menjelaskan, WFH tersebut nantinya juga disesuaikan dengan kepadatan agenda Istana Kepresidenan. Namun, dia memastikan, hanya ada 25 persen pegawai yang boleh bekerja di kantor. "Jika padat misal Senin, maka 25 persen di kantor, 25 persen di lapangan (sesuai kegiatan), 25 persen standby di rumah yang setiap saat on call jika ada tambahan kegiatan, 25 persen murni WFH," papar Heru.

Heru mengungkapkan, untuk 25 persen pegawai yang bekerja di kantor juga wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Mereka diwajibkan membawa

hasil tes antigen atau genose saat akan bekerja di lingkungan Istana.

Selain itu, akses masuk ke Istana Kepresidenan juga harus melalui prosedur protokol kesehatan. Heru mengatakan, tamu yang datang wajib menyerahkan hasil tes PCR yang menunjukkan negatif COVID-19 dalam periode 1x24 jam.

Tamu Istana Kepresidenan juga harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Mereka wajib menggunakan masker dan face shield.

Satgas COVID-19 dan Pemprom DKI Jakarta juga meminta perkantoran di zona merah untuk memberlakukan WFH 75 persen. Sementara, perkantoran yang berlokasi di zona kuning dan oranye masih dibolehkan menggelar WFH-WFO dengan kapasitas masing-masing 50%.

WFH 75 persen ini diberlakukan imbas terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Hari ini saja, penambahan kasus COVID-19 mencapai 12.990. Total kumulatif kasus COVID-19 yang ditemukan di RI hingga hari ini sebanyak 1.963.266 kasus. ● han

Komnas Perempuan Sayangkan Hakim Kurangi Vonis Jaksa Pinangki

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi masa hukuman Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

"Menyayangkan pengurangan hukuman terhadap PSM oleh Hakim Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (18/6).

Keputusan hakim tingkat banding itu mengindikasikan adanya persoalan lebih mendalam dalam aspek perspektif kesetaraan dan keadilan gender dan dalam hal sistem pemidanaan secara lebih luas.

Aminah mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang serius pada kemanusiaan

karena berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan rakyat yang terkait pemenuhan hak dasar warga.

"Karena perempuan lebih rentan dan mengalami rintangan lebih besar dalam menikmati hak asasi, tindak pidana korupsi juga mengakibatkan kerugian dan dampak sosial yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, terutama akibat dari korupsi di sektor layanan publik," ujarnya.

Terkait salah satu pertimbangan hakim untuk mengurangi hukuman Pinangki adalah karena memiliki anak balita dan perempuan yang harus mendapat perlindungan, perhatian dan diperlakukan secara adil, Aminah meminta semua pihak untuk melihat secara lebih luas. Ia mengatakan, banyak cara yang bisa ditempuh majelis hakim untuk memenuhi hak Pinangki sebagai perempuan tanpa harus mengurangi hukumannya. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PATROLI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PANTAI MANADO

Personel Badan Keamanan Laut (Bakamla) memeriksa kelengkapan keselamatan laut salah satu kapal nelayan yang beroperasi di sekitar wilayah pesisir pantai Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/6). Patroli tersebut dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi kerawanan keselamatan di laut, serta imbauan bagi para nelayan maupun pengguna jasa maritim di sekitar perairan pantai Manado, dan beberapa pulau di sekitarnya seperti Pulau Bunaken, Pulau Mantehage, Pulau Nain dan Pulau Siladen.

Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan dan Mengganti Dua Hari Libur Nasional

Libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember 2021 ditiadakan. Meniadakan cuti bersama pada Natal mendatang adalah upaya untuk menekan penularan virus Covid-19 di masyarakat.

JAKARTA (IM) - Pemerintah memutuskan untuk mengganti dua hari libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendy mengatakan, hal itu diputuskan

mengingat kondisi Covid-19 yang belum membaik. "Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6).

Libur nasional yang diganti adalah libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah dari semula Selasa 10 Agustus 2021 digeser satu hari menjadi Rabu 11 Agustus 2021. Kemudian,

libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Selasa 19 Oktober 2021 menjadi Rabu 20 Oktober 2021.

"Untuk libur cuti bersama Natal 2021 pada 24 Desember, ditiadakan," kata Muhadjir.

Ia mengatakan, keputusan tersebut juga berdasarkan arahan Presiden Jokowi yang meminta adanya peninjauan ulang terhadap hari libur nasional dan cuti bersama yang sudah tercantum dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri.

SKB tiga menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan

Covid-19, Sonny Harry B Harjadi mengatakan, setiap libur panjang selalu terjadi lonjakan kasus Covid-19.

"Kita tahu juga bawa varian baru tuh sebetulnya sudah masuk bahkan sebelum libur panjang. Artinya lonjakan kasus itu terjadi karena lebih karena libur panjang yang ada," ujarnya.

Bahkan, kata Sonny, pihaknya telah mengantisipasi lonjakan kasus melihat pada empat kali libur panjang di tahun 2020 lalu.

"Kami sudah sebetulnya sudah mengantisipasi dan melihat ke belakang ya pada empat kali libur panjang 2020, pernah disampaikan Presiden Jokowi 4 kali libur panjang selalu menaikkan atau menimbulkan lonjakan kasus serta diikuti oleh lonjakan angka kematian," ucapnya.

Ternyata, pada libur Lebaran pun tercatat 1,8 juta orang melaksanakan mudik meski telah dilarang.

"Lalu diikuti juga oleh peningkatan angka kematian tenaga kesehatan dengan meniadakan atau melarang mudik.

Tetapi faktanya masih cukup banyak ya sekitar 1,8 juta orang yang ternyata melakukan mudik. Mereka melakukan mudik sebelum pelarangan tanggal 6 sampai 17 Mei dan setelahnya," kata Sonny.

Menurut Sonny, terjadi kenaikan mobilitas penduduk yang menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19. Pasalnya, kenaikan mobilitas penduduk akan selalu diiringi oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan.

"Padahal kami sudah memprediksi kalau terjadi kenaikan mobilitas penduduk itu akan selalu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan, jadi bareng itu ya. Mobilitasnya naik, kepatuhan protokol kesehatan

turun. Dan keduanya itu menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya kasus ini," ucapnya.

Padahal, Indonesia pernah berhasil menurunkan kasus aktif Covid-19 pada Februari lalu. Menurutnya, Indonesia pernah berhasil menurunkan kasus aktif dari 176.500 lebih pada 5 Februari 2021 menjadi 87.662 kasus aktif di 18 Mei lalu.

"Jadi kita itu turun, karena apa? Karena kepatuhan protokol kesehatan yang naik, lalu kemudian mobilitas penduduknya turun. Nah itu jelas kali ketika kita dua-duanya itu berubah kepatuhannya turun, mobilitas naik, kasus aktifnya pun langsung naik seperti sekarang," katanya. ● han

Prabowo Harap Dokumen Strategis Sishankamrata Abad ke-21 Dijadikan UU

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, Konferensi Nasional (Konfernas) Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, telah menghasilkan dokumen strategis.

Dokumen tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Konferensi ini pada awalnya ditujukan (untuk) menghasilkan suatu dokumen strategis Sishankamrata untuk bangsa Indonesia di abad ke-21. Alhamdulillah setelah saya pelajari dan koreksi hasil konferensi ini, saya dapat melaporkan ke Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko Polhukam, dan juga akan saya laporkan ke Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa produk yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah cukup membanggakan," ucap Prabowo dilihat dalam YouTube Wakil Presiden, Jumat (18/6).

Mantan Danjen Kopassus itu menuturkan, dokumen strategis Sishankamrata yang telah dihasilkan oleh konfernas ini sangat aktual dengan kondisi abad ke-21. Materi dalam dokumen tersebut dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaksana dan penanggungjawab pertahanan negara.

"Karena itu, kami menyarankan kepada pimpinan nasional melalui Menko Polhukam, sudah kami sarankan, atas saran dari pelaku-pelaku konferensi nasional bahwa setelah produk strategis ini dipelajari oleh Menko Polhukam dan kalangan Wakil Presiden dan juga kalangan staf kepresidenan, mungkin juga menteri-menteri terkait disarankan bahwa produk ini dapat

berbentuk atau dapat diolah menjadi undang-undang bagi negara kita," harap Prabowo.

"Sehingga produk ini dapat digunakan sebagai pegangan oleh semua institusi dan semua lembaga-lembaga kenegaraan," tambahnya.

Prabowo berujar, Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 berlangsung selama lima hari, mulai dari 14 hingga 18 Juni 2021. Namun sebelum acara ini dimulai sudah ada kelompok kerja yang sudah membahas rancangan dokumen strategis tersebut.

Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 menghadirkan pembicara lintas institusi mulai dari perwakilan Kemhan, Mabes TNI, Mabes TNI AD, AL, AU, Mabes Polri, kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga kalangan industri pertahanan.

Prabowo menyoroti panyung hukum Sishankamrata di Indonesia sangat sangat terbatas dan bahkan 'jadul.' Karenanya, dokumen strategis yang dihasilkan dari Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 ini sangat relevan untuk diaktualisasikan pada kondisi saat ini dan yang akan datang.

Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 merumuskan sub-sistem doktrin Hankamrata, strategi Hankamrata dan postur Hankamrata menghadapi ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida.

Sishankamrata merupakan paradigma pertahanan dan keamanan negara untuk lebih mampu menghadapi dinamika ancaman militer, nonmiliter dan hibrida dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional.

Usai memberikan sambutan, Prabowo lalu memberikan dokumen strategis Konfernas Sishankamrata Abad ke-21 kepada Wapres Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Mahfud MD. ● mei

IDN/ANTARA



PEMERIKSAAN MASKUR HUSAIN

Tersangka Maskur Husain (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (18/6). Maskur Husain yang berprofesi sebagai pengacara itu diperiksa terkait kasus dugaan suap dalam penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara tahun 2020-2021 M. Syahril.

Banyak Anggota Dewan Terpapar Covid-19, DPR 75 Persen WFH

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada Kesetjenan DPR agar mengetatkan protokol kesehatan (prokes) dalam lingkungan Kompleks Parlemen, setelah puluhan anggota DPR positif terpapar Covid-19.

"Pihak Kesetjenan DPR harus memperketat protokol kesehatan di lingkungan Parlemen," kata Gus Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/6).

Muhaimin juga menyarankan agar rapat kerja (raker) yang dilaksanakan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR dengan Pemerintah, sebaiknya dilakukan secara virtual.

Cak Imin juga menyarankan, apabila rapat dibutuhkan kehadiran fisik maka harus dibatasi yaitu hanya 25 persen dari kapasitas ruang rapat. "Di ruangan cukup 25 persen saja, sisanya rapat dilakukan secara virtual. Rapat virtual tidak mengurangi esensi dari rapat itu sendiri," ujarnya.

Dia juga menginstruksikan kepada Kesetjenan agar

melakukan tes swab dan melakukan "tracking" dan "tracing" terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan anggota yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketua Umum DPP PKB itu juga berpesan kepada seluruh anggota DPR, Kesetjenan termasuk tenaga ahli agar selalu menaati protokol kesehatan.

"Meski sudah divaksin, kita tetap mematuhi prokes, sehingga tidak tertular virus Covid-19," katanya.

Sekadar diketahui, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan berdasarkan data yang diterimanya hingga saat ini tercatat sebanyak 11 anggota DPR dan banyak staf pendukung terpapar Covid-19 sehingga dilakukan pengetatan masuk Kompleks Parlemen.

"Data hingga hari ini mencatat yang terpapar Covid-19 ada 11 tenaga ahli, PPN terdiri dari Pengamanan Dalam (Pamdal) dan TV Parlemen ada 7 orang, PNS 17 orang, dan anggota DPR ada 11 orang," kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. ● mei

Elektabilitas Airlangga Naik, Partai Golkar Semakin Optimistis

JAKARTA (IM) - Dalam rilis hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis pada Kamis 17 Juni 2021, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto termasuk salah satu elite partai yang elektabilitasnya mulai menanjak menjadi 5,3%.

Dalam rilis yang sama, Airlangga juga disebut menjadi salah satu king maker atau penentu dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily melihat bahwa elektabilitas Ketumnya yang mulai merangkak naik itu merupakan bentuk apresiasi publik atas kinerjanya sebagai Menko Perekonomian dan juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 selama ini.

"Tentu hal tersebut harus dibaca sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas kinerja Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Ace saat dihubungi, Jumat (18/6).

Karena itu, kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini, Golkar semakin optimistis bahwa Airlangga berpeluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

"Melihat survei ini kami semakin yakin bahwa Pak Airlangga sangat berpeluang besar untuk memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti," ujarnya.

Sebagai tokoh politik yang baru disebut-sebut sebagai calon presiden (capres), menurut Ace, Airlangga sangat potensial untuk menjadi presiden.

Selain karena kinerjanya semakin diapresiasi masyarakat, perlahan-lahan upaya siste-

matis yang dilakukan para kader Partai Golkar di berbagai tingkatan sudah semakin terlihat hasilnya.

"Kecenderungan yang positif dari semakin merangkaknya elektabilitas Pak Airlangga dalam Pilpres menjadikan kami semakin optimistis bahwa Pak Airlangga dapat menduduki kursi RI 1," ungkap Ketua Ikatan Alumni UIN Jakarta (IKALUIN) ini.

Terlebih, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menambahkan, Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar memiliki tiket untuk dapat maju sebagai calon presiden dibandingkan nama-nama populer lainnya.

"Kami akan terus berjuang mensosialisasikan Pak Airlangga kepada masyarakat agar elektabilitasnya semakin tinggi, terutama di Jawa Barat, sebagai lumbung Partai Golkar," katanya. ● han

IDN/ANTARA



IMIGRAN ROHINGYA DIRELOKASI KE MEDAN

Imigran etnis Rohingya tiba di tempat penampungan sementara di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (18/6). Sebanyak 12 imigran etnis Rohingya yang menempati Balai Latihan Kerja (BLK) Kandang, Lhokseumawe, Aceh, direlokasi ke Medan, Sumatera Selatan, Kamis (17/8/2021) malam.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Mitra Sukses Konstruksi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Pekanbaru ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa terdapat rencana perubahan pemegang saham dalam Perseroan, sehingga terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan. Keberatan dan/atau sanggahan yang berkaitan dengan perubahan tersebut dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini disampaikan ke alamat berikut: Jalan SM Amin No. 4-5 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar Pekanbaru

Jakarta, 19 Juni 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Nuansa Teguh Kharisma, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Pekanbaru ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa terdapat rencana perubahan pemegang saham dalam Perseroan, sehingga terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan. Keberatan dan/atau sanggahan yang berkaitan dengan perubahan tersebut dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini disampaikan ke alamat berikut: Jalan SM Amin No. 3-4 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampar Pekanbaru

Jakarta, 19 Juni 2021
Direksi Perseroan